

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Keterbukaan Informasi Publik Melalui Media Banner di Desa Ria Raja, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende

Gayatri Amanda Ladopura^{1*}, Meylisa Yulastuti Sahan², Maria Florencia Yunita Bello³

Ilmu Komunikasi, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

*Email Korespondensi: amandaladopura@gmail.com

How to cite: Ladopura, G. A., Sahan, M. Y., & Bello, M. F. Y. (2026). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Keterbukaan Informasi Publik Melalui Media Banner di Desa Ria Raja, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat IPTEKS*, 3(4), 255-263. <https://doi.org/10.71094/jppmi.v3i4.451>

Received: 21-08-2026

Revised: 02-09-2026

Accepted: 16-09-2026

Published: 24-09-2026



Copyright © 2026, The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Abstract: This community service activity was motivated by the lack of information transparency and limited access to communication in Ria Raja Village, Ende District, Ende Regency. Using a Participatory Action Research (PAR) approach, the activity addressed several challenges identified in the field, including the absence of mobile phones and social media platforms, limited training opportunities for the Village Consultative Body (BPD), and the continued reliance on traditional and oral channels for conveying community aspirations, such as informal encounters on the street, communal prayer activities, and face-to-face village meetings. To address these limitations, the program focused on providing an information medium in the form of banners containing service information, public information, village potentials, and educational information presented transparently. The results of this community service activity are expected to provide an effective alternative communication medium for the BPD and the community in promoting village information transparency without relying on digital devices.

Keywords: Village Consultative Body (BPD), Public Information Transparency, Banner, Village Government, Ria Raja Village.

Abstrak: Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilatarbelakangi oleh kurangnya keterbukaan informasi dan terbatasnya akses komunikasi di Desa Ria Raja, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende. Dengan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), kegiatan ini merespons berbagai kendala di lapangan, seperti ketiadaan telepon seluler dan media sosial, minimnya pelatihan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta penyampaian aspirasi yang masih bersifat tradisional dan lisan misalnya saat berpapasan di jalan, kegiatan doa bersama, atau musyawarah desa secara langsung. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, program ini berfokus pada penyediaan media informasi berupa banner yang menampilkan informasi layanan, informasi publik, potensi desa, serta informasi edukatif secara transparan. Hasil kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menjadi media alternatif yang efektif bagi BPD dan masyarakat dalam mewujudkan keterbukaan informasi desa tanpa bergantung pada perangkat digital.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Keterbukaan Informasi Desa, Banner, Pemerintah Desa, Desa Ria Raja.

Pendahuluan

Desa menurut UU Desa No. 6 tahun 2014 khususnya pada pasal 1 ayat 1 didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia (Astono et al., 2023). Desa merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan publik di tingkat lokal. Desa menjadi pusat sentral pertama dalam pembangunan bangsa dan negara, karena desa merupakan bagian terkecil yang menjadi bagian urgen dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Desa juga merupakan ujung tombak pelayanan dan mempunyai cakupan otonomi yang luas bermakna penyerahan urusan sebanyak-banyaknya dan diposisikan sebagai pemerintahan masyarakat mandiri yang mengelola dirinya sendiri

BPD menjadi partner kerja pemerintah desa dan mempunyai kedudukan sejajar pada penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran krusial sebagai mitra strategis Pemerintah Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan dan penampungan aspirasi masyarakat. Keberhasilan BPD dalam menjalankan perannya sangat bergantung pada efektivitas komunikasi antara lembaga desa dan warga, khususnya dalam hal keterbukaan informasi publik (Andriani & Umar Balahmar, 2026).

Pada tingkat desa, keterbukaan informasi memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat. Desa sebagai pemerintahan terdepan dituntut untuk menyampaikan informasi secara mandiri dan terbuka, sejalan dengan prinsip desentralisasi (Faysal & Wahyu Pradana, 2023). Keterbukaan informasi publik juga merupakan fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. Upaya mewujudkan prinsip yang termuat dalam tata kelola pemerintahan yang baik telah difasilitasi dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Indah Mindarti et al., 2022). Setiap warga negara berhak memperoleh informasi untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya dan ia berfungsi sebagai sarana optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, badan publik lainnya, dan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan publik (Taufiq et al., 2024).

BPD sebagai lembaga penghubung antara pemerintah desa dan masyarakatnya, memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Wulandari et al., 2023). BPD merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang berkedudukan sejajar dengan pemerintah desa dan berfungsi sebagai mitra checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Anita et al., 2026). Di tingkat desa, Badan Permusyawaratan Desa memegang peranan vital sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. BPD memiliki fungsi strategi sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam forum musyawarah desa. Namun, efektivitas peran BPD sangat bergantung pada akses informasi yang memadai mengenai program kerja, kegiatan pembangunan, dan penggunaan anggaran desa, terutama dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. (Restu Tahta Negara et al., 2026)

Keterbukaan informasi menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah, termasuk informasi pelayanan, informasi publik, informasi potensi desa, serta informasi edukasi. Informasi yang jelas akan membantu masyarakat mempersiapkan dokumen sehingga dapat berlangsung secara lebih efektif (Amilia et al., 2026).

Informasi yang baik terlihat dari kemudahan informasi untuk diakses dan dijangkau oleh masyarakat (Anugrah et al., 2021). Kondisi di Desa Ria Raja saat ini menunjukkan tantangan serius terkait keterbukaan informasi. Akses masyarakat untuk memperoleh informasi masih sangat minim karena ketiadaan media informasi yang terstruktur. Selama ini, aspirasi dan informasi hanya disampaikan melalui interaksi informal, seperti pertemuan di jalan, kegiatan doa bersama, atau musyawarah desa. Ketidadaan platform digital atau media sosial, ditambah dengan keterbatasan sarana komunikasi perangkat desa, memperparah kesenjangan informasi di lapisan masyarakat paling bawah. Mulai dari infrastruktur teknologi, terutama di daerah terpencil yang memiliki kesulitan dalam mengakses internet, rendahnya literasi digital, menjadi hambatan utama dalam pelayanan publik di daerah terpencil.

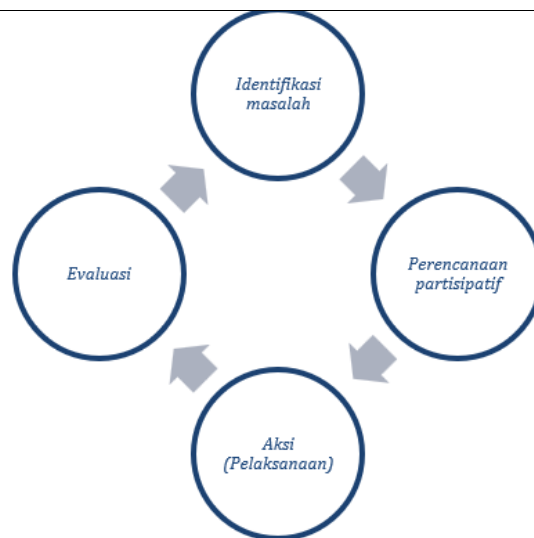
Banner adalah sarana komunikasi yang bertujuan untuk mendorong banyak masyarakat untuk melihat informasi apa yang disampaikan. Tujuan dari banner adalah untuk mempromosikan atau menunjukkan sesuatu sehingga menarik perhatian lebih banyak orang ketika mereka melihatnya (Wahyuningsih et al., 2025). Salah satu media luar ruang yang masih banyak digunakan karena dinilai praktis dan efektif ialah banner. Keberadaan banner membantu penyampaian informasi kepada masyarakat secara lebih cepat, mudah dibaca, serta mudah dipahami oleh berbagai kalangan (Putra Ode Amane et al., 2026).

Pemilihan media banner sebagai fokus pengabdian didasarkan pada efektivitasnya sebagai media visual yang mudah diakses dan dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Banner juga sebagai salah satu bentuk media yang memiliki keunggulan secara visual, memberikan informasi yang jelas, dan dapat dipasang di berbagai lokasi strategis (Chita Fitriana et al., 2025). Banner informatif dapat menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan informasi dan pesan kepada masyarakat seperti informasi pelayanan, informasi publik, informasi potensi desa, serta informasi edukasi. Keberadaan banner juga dapat membantu penyampaian informasi kepada masyarakat secara lebih cepat, mudah dibaca, serta mudah dipahami oleh berbagai kalangan.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR). PAR adalah metode penelitian yang menggabungkan tindakan (action) dan partisipasi (participation) dengan tujuan untuk mengatasi masalah nyata di lapangan. Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif dari subjek penelitian dalam setiap tahap penelitian, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dengan demikian, PAR tidak hanya menghasilkan data yang akurat, tetapi juga memberdayakan subjek penelitian untuk berkontribusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. (Imansyah, 2025)

PAR berfokus langsung pada identifikasi masalah nyata, kekurangan, serta hambatan mendasar di Desa Ria Raja, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, seperti ketiadaan telepon genggam dan media sosial, tidak adanya pelatihan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta metode komunikasi yang masih bersifat tradisional dan lisan. Melalui pendekatan ini, BPD dan masyarakat Desa Ria Raja dilibatkan secara aktif sebagai subjek utama dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari menganalisis kelemahan komunikasi harian yang selama ini hanya bergantung pada pertemuan di jalan, doa bersama, atau musyawarah langsung hingga bersama-sama merancang isi pesan pada media banner agar solusinya tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan informasi pelayanan publik di desa.



Gambar 1. Alur Perencanaan

Tahap alur perencanaan:

Tahap Identifikasi Masalah

Tahap ini merupakan langkah krusial dalam memahami hambatan struktural dan teknis di tingkat desa, di mana kesenjangan digital sering kali menjadi faktor penghambat utama dalam diseminasi informasi publik. Tahap ini berfokus pada pemetaan kelemahan dan kendala mendasar di desa, seperti ketiadaan perangkat komunikasi (HP), tidak adanya platform digital atau media sosial, serta belum adanya pelatihan bagi BPD dalam menyampaikan informasi secara luas kepada masyarakat.

Tahap Perencanaan Partisipatif

Melalui forum diskusi antara pemangku kepentingan tingkat desa terbukti mampu menciptakan solusi kontekstual yang sesuai dengan keterbatasan infrastruktur lokal, guna memastikan informasi dapat dikelola dan disebarakan secara optimal. Pada tahap ini dapat dilakukan diskusi langsung bersama BPD untuk merumuskan strategi pemecahan masalah atas hambatan penyampaian informasi yang selama ini hanya mengandalkan pertemuan lisan di jalan atau di rumah warga.

Tahap Aksi (Pelaksanaan)

implementasi media informasi seperti media banner di kawasan dengan literasi digital rendah menjadi strategi komunikasi yang efektif untuk menjamin transparansi informasi desa secara inklusif. Pada tahap ini dapat merancang dan memasang media banner informatif yang memuat informasi pelayanan, informasi publik, informasi potensi desa, serta informasi edukasi secara transparan agar dapat diakses langsung oleh masyarakat tanpa memerlukan perangkat digital.

Tahap Evaluasi

Menilai bersama BPD sejauh mana media banner berhasil menjadi solusi efektif atas ketiadaan akses informasi digital. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur peningkatan kesadaran masyarakat terhadap layanan desa dan efisiensi penyebaran informasi dibandingkan dengan metode komunikasi lisan sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

Pemanfaatan media informasi fisik seperti banner di Desa Ria Raja merupakan langkah strategis guna mengatasi keterbatasan akses informasi akibat kesenjangan digital. Ketiadaan infrastruktur teknologi, perangkat telepon genggam, dan media sosial membuat penyampaian informasi memerlukan

pendekatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Banner merupakan alat komunikasi efektif sebagai sarana yang meningkatkan informasi secara akurat dan efisien (Salman & Deniaty Sholihah, 2024). Dalam konteks ini, media banner menjadi pilihan yang praktis karena bersifat inklusif, dapat dijangkau oleh semua kalangan tanpa membutuhkan keahlian digital serta dapat diakses setiap saat. Kehadiran sarana visual ini juga mendukung peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya sebagai mitra pemerintah desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas dan peran strategis dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah desa dan warga, memastikan bahwa suara masyarakat terakomodasi dalam kebijakan dan program pembangunan (Astono et al., 2023). Peralihan dari kebiasaan komunikasi lisan yang bersifat informal seperti percakapan singkat di jalan atau saat kegiatan doa bersama. Media visual yang terstruktur membantu menciptakan arus informasi yang lebih terbuka, pasti, dan minim kesalahpahaman.

Melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan BPD dalam merencanakan kebutuhan informasi, pesan yang disampaikan menjadi lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan nyata warga. Pada akhirnya, keberadaan media informasi yang terpasang secara permanen di ruang publik tidak hanya mempermudah masyarakat dalam memahami hak dan layanan desa, melainkan juga fondasi penting untuk membangun budaya keterbukaan informasi dan menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang transparan.

Hasil

Pemanfaatan media banner sebagai sarana informasi pelayanan publik pada tingkat perdesaan masih relative terbatas, khususnya pada wilayah yang memiliki keterbatasan sarana teknologi informasi. Oleh karena itu, kegiatan ini penting dilakukan untuk mengkaji efektivitas media banner sebagai media komunikasi visual yang sederhana namun mampu meningkatkan akses informasi pelayanan masyarakat (Putra Ode Amane et al., 2026).



Gambar 2. Diskusi singkat bersama BPD

Pada tahap perencanaan partisipatif melalui fosum diskusi terbukti mampu menciptakan solusi kontekstual yang adaptif terhadap keterbatasan infrastruktur lokal guna memastikan informasi disebarkan secara langsung. Pada tanggal 29 Juni 2026 pukul 14.00-15.00 WITA telah dilakukan diskusi singkat langsung bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di rumahnya untuk merumuskan strategi pemecahan hambatan komunikasi yang selama ini hanya mengandalkan pertemuan lisan di jalan atau di rumah warga.



Gambar 3. Perancangan dan pemasangan media banner

Pada tahap pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2026 pukul 10.00-11.30 WITA bertempat di Kantor Desa Ria Raja, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende. Implementasi media banner di kawasan dengan literasi digital rendah terbukti menjadi strategi komunikasi yang efektif untuk menjamin transparansi informasi desa secara inklusif. Pada tahap ini dilakukan perancangan dan pemasangan media banner informatif yang memuat informasi pelayanan, informasi publik, informasi potensi desa, serta informasi edukasi secara transparan agar dapat diakses langsung oleh masyarakat tanpa memerlukan perangkat digital.

Proses pengabdian di Desa Ria Raja menunjukkan dinamika perubahan yang signifikan melalui pendampingan intensif. Ragam kegiatan yang dilaksanakan meliputi identifikasi kebutuhan informasi, diskusi partisipatif bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga perancangan konten visual pada media banner. Aksi program difokuskan pada pengadaan media informasi fisik sebagai Solusi atas ketiadaan akses telepon genggam dan media sosial di desa.

Tabel 1. Perubahan Pola Akses Informasi Masyarakat

No	Kategori	Sebelum Pengabdian	Setelah Pengabdian
1.	Sumber Informasi	Lisan (Informal)	Visual (Banner)
2.	Aksebilitas	Terbatas (Tidak menentu)	Tersedia 24 Jam
3.	Akurasi Data	Rendah (Subjektif)	Tinggi (Terstruktur)

Dinamika ini memicu perubahan perilaku masyarakat yang kini mulai terbiasa mencari informasi melalui banner yang terpasang di titik strategis yaitu di kantor desa. Terciptanya kesadaran baru ini menandai transformasi sosial di mana masyarakat tidak lagi bergantung pada pertemuan lisan. BPD pun kini memiliki pranata baru dalam menjalankan fungsi komunikasinya. Secara teoretik, hal ini sejalan dengan teori inovasi yang menyatakan bahwa adopsi media baru, meskipun sederhana mampu mengubah pola perilaku komunikasi dalam komunitas jika relevan dengan konteks sosialnya. Proses ketiadaan akses menuju keterbukaan informasi ini merupakan bentuk nyata dari pemberdayaan masyarakat yang mandiri.



Gambar 4. Evaluasi bersama BPD

Pada tahap evaluasi, pelaksanaan program dinilai secara komprehensif bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna mengukur sejauh mana pemasangan media banner informatif berhasil menjadi solusi yang efektif dan solutif dalam mengatasi permasalahan ketiadaan akses informasi digital di Desa Ria Raja. Pada tahap ini tidak hanya berfokus pada aspek keberhasilan fisik pemasangan media informasi saja, tetapi juga meninjau tingkat kemudahan akses publik terhadap ragam konten yang disajikan, mulai dari informasi pelayanan, informasi publik, potensi desa, hingga materi edukasi yang transparan. Melalui penilaian, diperoleh umpan balik (feedback) yang mendalam mengenai perbandingan efektivitas penyebaran informasi saat ini yang menggunakan media cetak permanen, dibandingkan metode konvensional sebelumnya yang hanya mengandalkan pertemuan lisan di jalan atau di rumah warga. Hasil dari evaluasi ini selanjutnya dapat menjaga keberlanjutan arus informasi yang lebih terstruktur, akuntabel, dan dapat diakses oleh seluruh warga tanpa terkecuali pada masa yang akan datang.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Ria Raja, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende menunjukkan bahwa penggunaan media informasi visual berupa banner berhasil menjadi Solusi efektif dalam mengatasi keterbatasan akses informasi digital serta kendala komunikasi tradisional yang sebelumnya hanya mengandalkan metode lisan. Melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR) dan kolaborasi aktif bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), program ini sukses mengoptimalkan penyebaran informasi melalui penyediaan media visual berupa banner informatif yang dipasang di titik strategis kantor desa. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan bersama, pemanfaatan media banner terbukti mampu mentransformasi pola akses informasi masyarakat dari yang sebelumnya konvensional, terbatas, dan subjektif hanya melalui komunikasi lisan seperti obrolan di jalan atau kegiatan doa bersama menjadi jauh lebih terstruktur, transparan, dan tersedia setiap saat tanpa bergantung pada perangkat teknologi digital.

Kehadiran media informasi fisik ini tidak hanya mempermudah warga dalam memperoleh kejelasan seputar layanan administratif, potensi desa, maupun materi edukasi secara akurat, tetapi juga memperkuat peran fungsional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra strategis pemerintah desa. Upaya ini berhasil membangun fondasi budaya keterbukaan informasi yang berkelanjutan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel di Desa Ria Raja.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang atas segenap bimbingan akademiknya, Pemerintah Desa Ria Raja yang telah

memberikan ruang serta fasilitas, serta kepada seluruh pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta warga Desa Ria Raja yang menyambut dan kebersamaian pelaksanaan kegiatan dengan penuh antusias dari awal hingga akhir kegiatan.

Daftar Pustaka

- Amilia, R., Cahyaningrum, I. J., & Triyana, R. (2026). *Sosialisasi Pelayanan Publik Melalui Pengadaan X-Banner Sebagai Media Informasi bagi Masyarakat Desa Tanjungsari*. 2(5), 3000–3011. <https://doi.org/10.63822/47gac610>
- Andriani, D. R., & Umar Balahmar, A. R. (2026). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Transparansi Anggaran Di Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminstrasi Dan Pelayanan Publik*, 13(2), 619–629. <https://doi.org/10.37606/publik.v13i2.2269>
- Anita, R., Wiguno Sanyoto, Y., Saleh, R., Ramayanti, H., Arista, R., Dwi Hasanah, A., Maudi, A., & Pratiwi, W. (2026). Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Wadah Aspirasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Baik (Good Governance). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 1006–1015. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.7590>
- Anugrah, A., Mahsyar, A., & Burhanuddin, B. (2021). Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gowa 2020. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 3(1), 53–63. <https://doi.org/10.26618/jppm.v3i1.5391>
- Astono, T. R., Suminah, & Sugihardjo. (2023). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Program Penyuluhan Pembangunan Di Desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. *JPPNu (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaa Nusantrantara)*, 5(2), 181–188. <https://doi.org/10.28926/jppnu.v5i2.202>
- Chita Fitriana, M., Supron, Hidayat, I., Nofiana, T., Septiani, Sukandar, R., Sinaga, L., & Damayanti, I. (2025). Optimalisasi Pemasaran UMKM Melalui Pembuatan Media Promosi Banner di Desa Jawilan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(6), 3036–3042. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v3i6.2909>
- Faysal, A., & Wahyu Pradana, G. (2023). Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus Di Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik). *Journal PUBLIKA*, 11(3), 2215–2230. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n3.p2215-2230>
- Imansyah, F. (2025). Mewujudkan Masyarakat Melek Digital: Strategi, Tantangan, Dan Implementasi Program Literasi Di Lingkungan Komunitas. *Jurnal Abdi Insani*, 12(6), 2605–2618. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v12i6.2556>
- Indah Mindarti, L., Saleh, C., & Puspaning Galih, A. (2022). Penerapan Inovasi Sistem Informasi Manajemen Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(1), 258–268. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i1.6336>
- Putra Ode Amane, A., S. Ibrahim, J., Rofiq Mokali, R., Saputra, Libuka, A., & Lahaya, F. (2026). Pemanfaatan Media Banner sebagai Media Informasi Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Lontio Baru Kecamatan Nambo. *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 5(2), 422–433. <https://doi.org/10.58192/karunia.v5i2.4902>
- Restu Tahta Negara, L., Basniwati, A., & Alfian Fallahiyah, M. (2026). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Fungsi Pengawasan Terhadap Pengelolaan Apbdes Dalam Mewujudkan Prinsip Akuntabilitas Pemerintahan Desa (Studi di Desa Darmasari, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur). *DISKRESI*, 5(1), 341–351. <https://doi.org/10.29303/xqecg820>
- Salman, S., & Deniaty Sholihah, D. (2024). Pemanfaatan Desain Banner Guna Meningkatkan Ketertarikan Konsumen Pada UMKM Kelurahan Gunung Anyar Tambak. *Jurnal Pengabdian Kepada*

-
- Masyarakat Nusantara*, 5(2), 2179–2184. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.2536>
- Taufiq, M., Arini Nursansiw, D., & Hidayat, R. (2024). Belajar Reflektif Keterbukaan Informasi Publik di Desa Berbasis Prinsip Kepemerintahan melalui Transparansi. *Panrita Abdi*, 8(1), 193–204. <https://doi.org/10.20956/pa.v8i1.26137>
- Wahyuningsih, D., Darman, S., Auli, M., Djakfar, Y., & Eliyana, I. (2025). Pelatihan dan Pembuatan Banner pada Aplikasi Canva untuk meningkatkan Kreativitas Desain Promosi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pondok Mapan Ibu Sundari di Desa Marga Bakti Training. *Jurnal Pengabdian Bersama Masyarakat Indonesia*, 3(1), 80–86. <https://doi.org/10.59031/jpbmi.v3i1.591>
- Wulandari, R., Kadir, A., & Lubis, Y. A. (2023). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pemerintahan (JIAPP)*, 1(2), 101–107. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v1i2.607>